

## Jokowi Luncurkan Perangko Seri Vaksinasi Nasional Covid-19

JAKARTA (IM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan perangko seri vaksinasi nasional Covid-19. Pada seri perangko ini digunakan foto Presiden Jokowi saat menerima suntikan vaksinasi dosis pertama.

Warna perangko 5000 tersebut didominasi putih dan merah bertuliskan Vaksinasi Covid-19 dan #VaksinasiAmanHalal. Kemudian di sisi kanan bertuliskan INDONESIA.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengatakan bahwa peluncuran seri perangko ini merupakan bentuk representasi Indonesia dalam menangani pandemi

covid-19. "Peluncuran seri perangko ini merepresentasikan Indonesia sebagai negara yang dengan cepat dan sigap memerangi pandemi covid-19 melalui vaksinasi covid-19 untuk masyarakat agar dapat mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity," katanya di Istana negara, Jumat (26/2).

Plate menyebut bahwa di masa yang akan datang penerbitan perangko dapat dilakukan secara digital dengan metode barcode.

"(Barcode ini) untuk tracing dan tracking yang dilengkapi dengan fitur virtual reality pada perangko agar lebih detail dan menarik," tandasnya. ● mei

## Panah hingga Samurai Diamankan dari Rumah Terduga Teroris di Surabaya

SURABAYA (IM) - Densus 88 Antiteror mengamankan terduga teroris di Kelurahan Medokan Ayu, Kecamatan Rungkut. Dari rumahnya, petugas menemukan panah hingga samurai. Terduga teroris tersebut berinisial AIH (40). Ia tinggal di Jalan Medokan Sawah No 121.

Ketua RT 01 RW 01 Kelurahan Medokan Ayu, Soepangin, membenarkan soal penangkapan terduga teroris tersebut.

"Terus saya dihubungi Densus mau ada anu. Saya juga kaget saya nggak tahu. Saya keluar tahu-tahu ada polisi di situ. Uda gitu tok," lanjut Soepangin.

Soepangin mengaku ikut menyaksikan penggeledahan rumah terduga teroris tersebut. Menurutnya ada sejumlah barang yang dibawa dari rumah tersebut oleh Densus 88 Antiteror.

"Yang ditemukan saya hanya ikut menyaksikan mencari, tadi ada panah, samurai, alat-alat tinju nggak tahu. Katanya ikut taekwondo," ungkap Soepangin.

Menurut Soepangin,

penggeledahan dilakukan oleh sekitar 10 petugas dari Densus 88 Antiteror. Mereka menggunakan lima mobil dan satu mobil polisi.

Soepangin memperkirakan, terduga teroris tersebut tinggal di Jalan Medokan Sawah sejak 10 tahun lalu. AIH dikenal sebagai orang yang baik di lingkungannya.

"Kesehariannya orangnya baik. Kalau ada orang meninggal yang ikut melayat takziah gitu," ungkap Soepangin.

Ia menambahkan, rumah terduga teroris tersebut ditempati lima orang dan memiliki usaha servis handphone dan jual pulsa.

"Jualan pulsa dan servis HP, di situ juga ada karyawannya lima orang," ungkap Soepangin.

Pihak kepolisian juga membenarkan soal penangkapan terduga teroris tersebut. Kanit Reskrim Polsek Rungkut Iptu Joko Soesanto mengatakan, pihaknya membantu mengamankan lokasi.

"Iya gitu. Betul (kami) cuma diminta mengamankan lokasi) habis salat Jumat," kata Joko. ● han

IDN/ANTARA



## PRANGKO EDISI VAKSINASI NASIONAL COVID-19

Petugas menunjukkan sampul hari pertama prangko edisi vaksinasi nasional COVID-19 di Kantor Filatelit, Jakarta, Jumat (26/2). Kementerian Komunikasi dan Informatika meluncurkan prangko seri vaksinasi nasional COVID-19 sebagai bentuk representasi Indonesia dalam menangani pandemi COVID-19.

## Wakil Bupati Dilantik dengan Tangan Diborgol dan Pakai Rompi Tahanan

PALEMBANG (IM) - Terdakwa kasus dugaan korupsi lahan kuburan, Johan Anuar, mendapat izin keluar dari Rumah Tahanan (Rutan) Kelas 1 Palembang untuk dilantik sebagai Wakil Bupati Ogan Komering Ulu (OKU) di Griya Agung Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (26/2).

Johan keluar dari Rutan pukul 13.53 WIB dengan pengawasan ketat dari anggota Brimob Polda Sumatera Selatan serta KPK. Saat keluar, Johan yang mengenakan topi dan masker hanya tertunduk. Tak hanya itu, ia juga mengenakan rompi tahanan KPK berwarna orange serta dalam kondisi tangan terborgol.

Setelah keluar, Johan langsung masuk ke mobil silver dengan pelat nomor BG 1158 ZF menuju ke Griya Agung Palembang.

Kuasa Hukum Johan Anuar, Titis Rachmawati sempat memprotes KPK karena kliennya itu harus diborgol. Menurut Titis, Johan keluar dari rutan telah melalui mekanisme izin dari pihak pengadilan untuk mengikuti proses pelantikan sebagai wakil bupati, sehingga tidak perlu diborgol layaknya seorang tahanan.

"Ini peruntukannya buat apa (diborgol) kan ini mau dilantik sebagai Wakil Bupati, kan bukan mau kabur," kata

Titis saat datang ke Rutan Pakjo Palembang.

Meski pengacaranya melakukan protes, Johan pun masih tetap diborgol serta menggunakan rompi tahanan KPK saat keluar dari rutan. Titis menerangkan, Johan sudah mengikuti seluruh aturan dari rutan dengan menerapkan protokol kesehatan serta pengamanan.

Sehari sebelum keluar rutan, terdakwa dugaan kasus suap lahan kuburan sebesar Rp 5,7 miliar itu sudah menjalani swab.

"Swabnya sudah kemarin, nanti setelah balik lagi ke sini swab lagi," ujarnya.

Untuk diketahui, JPU KPK sebelumnya menjerat Wakil Bupati OKU Johan Anwar dengan pasal berlapis.

Dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Palembang pada Selasa (22/12) lalu, Johan diduga telah menerima suap sebesar Rp 5,7 miliar atas kasus dugaan korupsi pengadaan tanah lahan kuburan di Kabupaten OKU ketika menjabat sebagai wakil ketua DPRD setempat pada 2013 lalu.

Meski ditetapkan sebagai terdakwa kasus lahan kuburan, Johan yang maju sebagai Wakil Bupati OKU dan berasapangan dengan Kuryana Aziz itu berhasil menggungguli kotak kosong pada pilkada serentak 9 Desember lalu 2020. ● mei

# 2 Polhukam

IDN/ANTARA



## TERDAKWA KORUPSI HADIRI PELANTIKAN KEPALA DAERAH

Wakil bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) terpilih Johan Anuar mengenakan rompi oranye meninggalkan Lapas Klas 1A Pakjo menuju lokasi pelantikan kepala daerah di Griya Agung Palembang, Sumsel, Jumat (26/2). Johan Anuar terdakwa kasus dugaan korupsi tanah kuburan memperoleh izin Pengadilan Negeri (PN) Palembang keluar rutin untuk mengikuti pelantikan dirinya sebagai Wakil Bupati OKU periode 2020-2025.

# Buntut Isu Kudeta, 7 Kader Partai Demokrat Bakal Dipecat

Ketua DPD Partai Demokrat Banten, Iri Octavia Jayabaya, sebelumnya meminta kader yang tidak sejalan dengan partai untuk mencari tempat lain. Ia mengatakan hal itu terkait adanya kader yang membelot.

JAKARTA (IM) - Isu kudeta Partai Demokrat berbuntut panjang. Partai yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu akan memecat 7 kader yang diduga terlibat dalam upaya pengambilalihan kepemimpinan partai berlambang bintang mercy tersebut.

Isu pemecatan terhadap tujuh kader disampaikan Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat, Andi Arief.

"Demi harapan ratusan ribu kader dan jutaan simpatisan dan pemilih, kami mendukung sepenuhnya langkah pemecatan terhadap 7 kader yang dilakukan oleh dewan kehormatan partai. Gelombang pertama 7 orang," kata Andi Arief yang dikutip dari akun

Twitter @andiarief, Jumat (26/2).

Namun demikian, mantan aktivis 98 itu tak mau merinci nama-nama kader yang bakal dipecat tersebut.

Dihubungi terpisah, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP PD, Herzaky Mahendra Putra menyatakan, pihaknya belum bisa mengumumkan nama-nama kader yang dipecat itu. Dia hanya meminta awak media untuk menunggu.

"Ditunggu ya (nama-nama kader yang dipecat, red)," singkat Herzaky dihubungi terpisah.

Ketua DPD Partai Demokrat Banten, Iri Octavia Jayabaya, sebelumnya meminta kader yang tidak sejalan dengan partai untuk mencari

tempat lain. Ia mengatakan hal itu terkait adanya kader yang membelot mengatasnamakan DPD Banten.

Iri juga mengungkapkan, jika kader sudah tidak sanggup lagi untuk membesarkan nama partai, janganlah merusak. Menurutnya, kesetiaan seluruh jajaran DPD Demokrat Banten kepada Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tak perlu diragukan lagi.

"Jika tidak sanggup membesarkan partai, jangan merusak partai. Kesetiaan DPD Demokrat Banten pada Ketum dan DPP tidak perlu diragukan lagi," kata Iri, mengutip akun Twitter resmi Partai Demokrat @PDDemokrat.

Iri pun mempersilakan kader untuk angkat kaki jika memang sudah tidak sejalan dengan partai.

"Jika tidak sesuai, silakan berpindah ke tempat lain. Buk-tikan kalau memang jago," katanya.

Sebagaimana diketahui, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) angkat bicara soal isu kudeta yang ingin

menggulingkan AHY sebagai Ketua Umum Demokrat.

SBY telah mendapatkan laporan resmi dari pimpinan partai dan juga mendapatkan informasi dari daerah, bahwa segelintir kader dan mantan kader pelaku GPK PD itu masih bergerak di lapangan secara sembunyi-sembunyi.

"Segelintir kader dan mantan kader pelaku GPK PD itu masih bergerak di lapangan secara sembunyi-sembunyi, kucing-kucingan. Berarti gerakan ini masih ada," ungkapnya.

Menurut SBY, yang disasar oleh mereka bukan lagi para Ketua DPD ataupun Ketua DPC, tetapi siapa pun yang mau diiming-imingi sejumlah imbalan dan janji-janji yang menggiurkan. Jadi, sangat mungkin para pelaku gerakan itu menghasut dan mengadu domba antara pimpinan DPP Partai Demokrat dengan para Ketua DPD dan Ketua DPC.

"Dengan memainkan isu bahwa dalam Musda dan Muscab mendatang mereka akan diganti, sesuatu yang tidak benar adanya," tegasnya.

Kemudian, sambung Presiden RI ke-6 ini, sejumlah mantan kader dan ingin mengantikan Ketum AHY yang sah, dengan bapak KSP Moeldoko," sambungnya.

Untuk itu, Renanda mengatakan bahwa teman-teman orsap PD jangan terkejut dan ingin memberikan pernyataan sikap untuk merespons pertemuan tadi siang yang dilakukan oleh sekitar dua orsap PD.

"Ini tidak semua orsap hadir karena agak mendadak waktunya, tapi yang hadir cukup banyak dari orsap PD dan saya rasa kita tidak ada pernyataan sikap bersama. Tapi, saya ingin memberikan kesempatan pada masing-masing ketum orsap untuk merespons dan memberikan pernyataan sikap terkait sejumlah orsap PD yang sekali lagi pada siang tadi melakukan prescon," ujarnya. ● han

Sebelumnya 7 organisasi sayap (orsap) Partai Demokrat melakukan deklarasi penolakan terhadap Kongres Luar Biasa (KLB) dan juga pencalonan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Mereka menyatakan tetap mendukung kepemimpinan Ketum

## KSAD Naikkan Pangkat 12 Perwira Tinggi

JAKARTA (IM) - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa menaikkan pangkat 12 perwira tinggi (Pati) TNI AD melalui proses yang berlangsung di Lantai Dasar Gedung E Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad), Jakarta, Jumat (26/2).

"KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa menerima Laporan Korps Kenaikan Pangkat 12 orang Pati TNI Angkatan Darat," demikian keterangan tertulis Dinas Penerangan Angkatan Darat (Dispenad), Jumat (26/2).

Adapun 12 Pati TNI AD yang mendapat kenaikan pangkat sebagai berikut:

Dari Mayjen TNI menjadi Letjen TNI: Danspupomad, Letjen TNI Chandra W Sukotjo, Danpusenif Kodiklatad, Letjen TNI Arif Rahman.

Dari Brigjen TNI menjadi Mayjen TNI: Pa Sahli Tk III Bidang Jahpres Panglima TNI, Mayjen TNI Gunawan Pakki, Pa Sahli Tk III KSAD Bidang Komsos, Mayjen TNI Karmin Suharna 3. Sahli Bidang SDM dan Teknologi Kemenko Polhukam, Mayjen TNI Jeffrey

APoly Rahawarin

7 Brigjen TNI: Pa Sahli Tk II Lingkungan Hidup Sahli Bidang Wassus dan LH Panglima TNI, Brigjen TNI yaitu Brigjen TNI Arief Prayitno, Pa Sahli Tk II Kumham dan Narkoba Sahli Bidang Sosbud Kumham dan Narkoba Panglima TNI, Brigjen TNI Sugeng Priyanto, Ir Pusterad, Brigjen TNI Victor Deni S.A. Herianto, Asdep Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan Kemenko Polhukam, Brigjen TNI Frengky E Riupassa, Dirlem Secapaad, Brigjen TNI Dadang Arif Abdurahman, Pa Sahli Tk II Wassus Sahli Bid. Wassus dan LH Panglima TNI, Brigjen TNI Eko Suhariyono, Dansatinteltek Bais TNI, Brigjen TNI Nurcahyo Utomo.

Adapun acara kenaikan pangkat ini berjalan dalam keadaan khidmat, tertib dan lancar, serta tetap berpedoman pada protokol kesehatan.

Dalam acara tersebut juga ditampilkan profil masing-masing pejabat melalui tayangan videotron serta dilanjutkan dengan foto bersama dengan didampingi istri masing-masing. ● han



## LAHAN SAWAH MENYEMPIT ANCAM KETAHANAN PANGAN

Petani memanen padi di kawasan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (26/2). Direktur Pengendalian Hak Tanah, Alih Fungsi Lahan, Kepulauan dan Wilayah Tertentu Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Asnawati mengatakan adanya alih fungsi lahan akan mempengaruhi produksi padi sehingga harus diwaspadai karena bisa mengancam ketahanan pangan.